
IMPLIKASI KORUPSI PERTAMINA TERHADAP KEPERCAYAAN INVESTOR & PERTUMBUHAN GDP NASIONAL

Aisyah Fahriza

STIE Indonesia Banking School
aisyah.20231111023@ibs.ac.id

Rara Marcela

STIE Indonesia Banking School
rara.20231111017@ibs.ac.id

Alfina Marta

STIE Indonesia Banking School
alfina.20231111025@ibs.ac.id

Ratu Aribah Santika Xaviera

STIE Indonesia Banking School
ratu.20231111016@ibs.ac.id

Aradea Margareta*

STIE Indonesia Banking School
aradea.20231111029@ibs.ac.id

Diterima 19 Maret 2025; Disetujui 12 Desember 2025; Dipublikasikan 25 Desember 2025

Abstract

In the economic sector, corruption will certainly complicate economic development, which in the private sector will certainly increase costs due to illegal payments and the risk of canceling agreements or investigations. Corruption has a huge impact, including slowing down the country's economic growth and decreasing investment, creating income inequality, and increasing poverty in the country. This research aims to analyze the impact of corruption in Pertamina on Indonesia's economic stability, investor confidence, and Gross domestic product (GDP) growth. By using descriptive qualitative research methods to collect data from the Ministry of Finance related to fuel subsidies, as well as investment movements in the energy sector. The results showed that the corruption case at Pertamina had a negative impact on economic stability. In addition, investor confidence in Indonesia's energy sector has decreased, which is characterized by weakening foreign direct investment and fluctuations in the capital market. The broader impact was also seen in GDP growth, where the oil and gas sector, which was previously one of the main pillars of the economy, slowed down due to the instability caused by the corruption case. This study recommends increased transparency and better corporate governance through the implementation of Good corporate governance (GCG).

Keywords

corruption, pertamina, economic stability, investor confidence, GDP

**) Corresponding Author*

Abstrak

Dalam sektor ekonomi, korupsi tentunya akan mempersulit pembangunan ekonomi dimana didalam sektor privat tentunya akan meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan terjadinya resiko pembatalan perjanjian atau juga karena adanya penyidikan. Korupsi memiliki dampak yang sangat besar, diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi negara serta menurunnya investasi, menciptakan ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan negara. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak korupsi di Pertamina terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, serta pertumbuhan *Gross domestic product* (GDP) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif guna mengumpulkan data dari Kementerian Keuangan terkait Subsidi BBM , serta pergerakan investasi di sektor energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi di Pertamina berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, kepercayaan investor terhadap sektor energi Indonesia mengalami penurunan yang ditandai dengan melemahnya investasi asing langsung dan fluktuasi di pasar modal. Dampak lebih luas juga terlihat pada pertumbuhan GDP, di mana sektor minyak dan gas yang sebelumnya menjadi salah satu penyokong utama perekonomian mengalami perlambatan akibat ketidakstabilan yang disebabkan oleh kasus korupsi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik melalui penerapan *Good corporate governance* (GCG).

Kata Kunci

korupsi, Pertamina, stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, GDP

Pendahuluan

Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan, yang merupakan proses perubahan yang terencana, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan energi yang besar memiliki ketergantungan tinggi pada sektor migas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai perusahaan energi nasional, PT Pertamina (Persero) memainkan peran kunci dalam menjaga ketahanan energi, meningkatkan penerimaan negara, serta menarik investasi di sektor migas dan energi terbarukan. Strategi bisnis dan kebijakan Pertamina berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional, baik dalam aspek harga energi, ketahanan pasokan, maupun kontribusinya terhadap *Gross domestic product* (GDP).

Namun, industri energi di Indonesia tidak terlepas dari tantangan besar, salah satunya adalah korupsi yang dapat merusak tata kelola perusahaan dan menghambat efisiensi ekonomi. Kasus- kasus korupsi yang melibatkan sektor energi, termasuk Pertamina, dapat menurunkan kepercayaan investor, mengurangi arus investasi asing langsung (FDI), serta memengaruhi stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap GDP di Indonesia.

Dampak korupsi terhadap perkembangan ekonomi dapat menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan efisiensi, kualitas barang dan jasa yang menurun, berkurangnya pendapatan negara dari pajak, serta peningkatan utang negara.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak korupsi di Pertamina terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, serta pertumbuhan *Gross domestic product* (GDP) Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk memperkuat transparansi, tata kelola perusahaan, dan kebijakan energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Landasan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Konsep dan teori ekonomi terkait korupsi serta dampaknya dalam ekonomi. (Chetwynd, 2003) Berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan korupsi memiliki hubungan yang kompleks, yang berarti korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Landasan teori dan konsep ini adalah sebagai berikut.

1. Korupsi membatasi investasi dalam negeri dan luar negeri. Penetapan sewa akan menjadikan biaya melonjak yang menimbulkan ketidakpastian, sehingga mengurangi daya tarik bagi investor luar negeri maupun dalam negeri.
2. Korupsi membebani kewirausahaan. Pegusaha perlu izin dan lisensi serta memberikan uang suap yang menjadikan keuntungan mereka lebih kecil.
3. Korupsi berdampak buruk pada kualitas infrastruktur publik. Sumber daya yang seharusnya untuk kepentingan bersama justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan standar diabaikan. Anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan dipakai untuk mendukung lebih banyak kegiatan mencari keuntungan pribadi.
4. Korupsi menurunkan pendapatan pajak. Perusahaan dan kegiatan berpindah ke sektor informal atau sektor abu-abu karena pengambilan sewa yang berlebihan dan pajak dikurangi dengan imbalan pembayaran kepada pejabat pajak. Meningkatnya korupsi menyebabkan menurunnya tata kelola, memperburuk kemiskinan, menurunkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan.
5. Korupsi mengalihkan bakat ke pencarian rente. Pejabat yang seharusnya fokus pada hal-hal produktif justru sibuk dengan pengambilan rente, di mana semakin besar keuntungan, semakin banyak pula pengambilan rente yang terjadi.
6. Korupsi merubah alokasi belanja *public*. Para pencari rente akan fokus pada proyekproyek yang paling mudah dan paling sulit terdeteksi, sehingga dana yang seharusnya untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan dialihkan.

Korupsi adalah salah satu penyebab rendahnya pendapatan dan berperan penting dalam menciptakan jebakan kemiskinan (Blackburn et al.; 2006 dalam Sri Natwami 2014). Meskipun demikian, beberapa orang berpendapat bahwa dengan "meminyaki roda" (oiling the wheel) birokrasi, korupsi terkadang bisa memberikan manfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985 dalam Nawatmi, 2014).

Stabilitas Ekonomi: Indikator Ekonomi yang Terdampak oleh Korupsi

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi, korupsi sangat berdampak pada indikator ekonomi. Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang terhambat karena *multiplier effect* rendahnya tingkat investasi. Situasi ini terjadi karena investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Untuk mengukur sejauh mana suatu negara terpengaruh oleh korupsi, salah satu metode yang digunakan adalah melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial semakin membesar. Kelompok orang kaya yang memiliki kekuasaan dan akses untuk melakukan suap, semakin memperkaya diri mereka, sementara kelompok miskin justru semakin terjerumus dalam kemiskinan. Selain itu, tindakan korupsi juga mengalihkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, yang pada akhirnya mengurangi anggaran pemerintah untuk pembelanjaan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya, rakyat miskin terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak layak, dengan akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas atau layanan kesehatan yang memadai. (KPK, 2022).

Kepercayaan Investor: Faktor yang Memengaruhi Keputusan Investasi

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.

1. Risiko dan Pengembalian (*Risk and Return*) Menurut Markowitz (1952), investor cenderung memilih investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan mempertimbangkan risiko yang dapat diterima. Konsep portofolio efisien berfokus pada pencapaian keseimbangan antara tingkat risiko dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh.
2. Kondisi Ekonomi (*Economic Conditions*) Fama (1970) dalam teori pasar efisien menyatakan bahwa hal yang mendorong investor untuk berinvestasi adalah kondisi ekonomi yang baik seperti inflasi yang terkendali, suku bunga rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Namun sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dan resesi cenderung membuat investor lebih berhati-hati.
3. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah (*Regulation and Government Policy*) Kebijakan pemerintah, seperti pajak, regulasi pasar modal, dan kebijakan moneter, memiliki dampak besar terhadap

keputusan investasi. Modigliani dan Miller (1958) juga menjelaskan bagaimana kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan investasi yang diambil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Septyanto, 2013) menunjukkan bahwa niat investasi tidak dipengaruhi oleh informasi keuangan. Dengan demikian, kegunaan laporan keuangan tidak berpengaruh dalam penentuan keputusan investasi saham.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fridana, 2009) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti literasi keuangan, kepercayaan diri berlebihan (*overconfidence*), perilaku mengikuti orang lain (*herding*), toleransi risiko, dan persepsi terhadap risiko mempengaruhi keputusan investasi di kalangan mahasiswi di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman keuangan yang baik, merasa percaya diri dalam mengambil keputusan, cenderung meniru tindakan orang lain, berhati-hati dalam membuat keputusan, dan selalu mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi.

Teori GDP

(Van den Bergh, 2009) menyatakan bahwa *Gross domestic product* (GDP) merupakan total nilai uang dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di sebuah negara dalam periode satu tahun. GDP riil per kapita yang sudah disesuaikan dengan inflasi, sering digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara, baik dari waktu ke waktu maupun jika dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, GDP sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, meskipun sebenarnya GDP bukanlah ukuran langsung untuk kesejahteraan. Hubungan ini berkembang seiring waktu dan banyak digunakan untuk menggambarkan "standar hidup" atau kualitas hidup di suatu negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nawatmi, 2014) yang berjudul “Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik” menyatakan bahwa jika suatu Negara semakin bersih dari korupsi, maka GDP riil Negara tersebut akan semakin tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada kasus korupsi di Pertamina dan dampaknya terhadap kepercayaan investor, pertumbuhan *Gross domestic product*, APBN, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan data sekunder dan interpretasi terhadap dampak ekonomi. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber, yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat laporan keuangan negara terhadap subsidi BBM, berita dan jurnal ilmiah untuk mendapatkan perspektif akademis, serta data pasar modal dan investasi, termasuk pergerakan harga saham Pertamina. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi laporan, analisis literatur dengan jurnal ilmiah, dan menelaah pemberitaan media nasional serta internasional untuk melihat reaksi pasar dan investor terhadap kasus korupsi di Pertamina. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif dengan mengidentifikasi dampak korupsi terhadap keuangan Pertamina, kebijakan pemerintah, dan kondisi makroekonomi. Selain itu, juga menganalisis perubahan dalam subsidi BBM, APBN, inflasi, nilai tukar, dan harga saham. Serta melihat bagaimana pemerintah dan Pertamina menanggapi dampak yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Dikuti dari laman (Martiar, 2025), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yaitu Riva Siahaan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Riva ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya. Dari penyidikan, diduga tersangka Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono melakukan pengondisian dalam Rapat Optimasi Hilir yang kemudian dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal itu berakibat pada tidak terserapnya seluruh produksi minyak bumi.

Mengutip dari situs resmi (Kejagung, 2025) per tanggal 25 Februari 2025, Dikatakan bahwa Tim Penyidik

pada Jaksa Agung Muda telah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero). Penahanan tersebut telah resmi dilakukan pada Senin, 24 Februari 2025. Tim Penyidik menyimpulkan dalam ekspose perkara bahwa terbukti adanya tindak pidana korupsi yang dapus enam puluh sembilan) dokumen, dan penyitaan terhadap 45 (empat puluh lima) barang bukti elektroat merugikan negara. Dimana alat bukti tersebut diantaranya, pemeriksaan saksi 96 (sembilan puluh enam) orang, pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli, penyitaan terhadap 969 (sembilan ratnik. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Tim penyidik akan menahan para tersangka selama 20 (dua puluh) hari kedepan.

Kasus korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina ini tentunya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang sedang ramai diperbincangkan dan diusut oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018-2023, Kejaksaan Agung melakukan praduga bahwa Pertamina melakukan praktik *impor* minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak produksi dalam negeri. Selain itu, dikatakan ada indikasi bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) berkualitas lebih rendah dijual dengan harga lebih tinggi. Hal itu akhirnya membebani keuangan negara dan masyarakat (Kurnia, 2025).

Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan Rp 193,7 triliun. Angka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian akibat *ekspor* minyak mentah dalam negeri, pembelian minyak *impor* dengan harga tidak wajar, hingga pemberian subsidi dan kompensasi yang seharusnya bisa ditekan jika tata kelola energi berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa tindak pidana kasus korupsi yang sedang terjadi saat ini, merupakan tindak pidana paling sulit dan menantang untuk diungkap (Kurnia, 2025).

Kerugian Negara akibat Korupsi Pertamina

1. Pertama

Kerugian akibat *ekspor* minyak mentah. Pemerintah, melalui Permen ESDM No. 42 Tahun 2018, memerintahkan Pertamina mencari pasokan minyak domestik sebelum merencanakan *impor*. KKKS, di sisi lain, diminta untuk menawarkan minyak bagian produksi mereka ke Pertamina, paling lambat tiga bulan sebelum pengajuan *ekspor*. Dalam penyidikan, Kejaksaan menemukan indikasi Pertamina enggan menyerap minyak bagian KKKS untuk melanggengkan *impor* yang bermasalah. Ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp 35 triliun. Angka itu diperoleh dari selisih harga *ekspor* dengan harga pembelian dalam negeri dikalikan volume *ekspor plus* biaya kemahalan. Berdasarkan data BPS, *ekspor* minyak mentah tahun 2023 adalah 21,2 juta barel. Dengan rata-rata harga minyak US\$82,64 per barel dan nilai tukar Rp15.416/US\$, nilai *ekspor* mencapai Rp 27 triliun. Jika kerugian negara dihitung dari selisih harga perolehan Pertamina berdasarkan harga minyak dunia dan ICP, selisihnya hanya Rp 1,36 triliun. Ini diperoleh dari volume minyak (21,2 juta barel) x rata-rata harga ICP US\$78,43 per barel x Rp15.416. Di poin ini, estimasi kerugian negara sebesar Rp 35 triliun terlihat overestimate.

2. Kedua

Kerugian akibat *impor* minyak mentah melalui broker. Pada 2023, *impor* minyak mentah mencapai 133 juta barel. Nilainya mencapai US\$11,1 miliar atau setara dengan Rp 171,8 triliun. Hampir semua *impor* minyak mentah dilakukan Pertamina, karena hanya Pertamina yang punya kilang untuk mengolahnya. Di poin ini, Kejaksaan menyebut potensi kerugiannya sebesar Rp 2,7 triliun. Jika basis kerugian dihitung dari brokerage fee sebesar US\$2 per barel, potensi kerugian negara adalah Rp 4,1 triliun.

3. Ketiga

Kerugian akibat *impor* BBM melalui broker. Menurut BPS, *impor* produk kilang pada 2023 mencapai 204,2 juta barel, dengan nilai sebesar US\$21 miliar atau setara dengan Rp323,9 triliun. Kejaksaan menyebut potensi kerugiannya sebesar Rp 9 triliun. Ini berasal dari selisih harga *impor* dengan harga produksi dalam negeri kali volume produksi.

4. Keempat

Kerugian akibat penyimpanan dana kompensasi BBM sebesar Rp 126 triliun. Kompensasi diberikan kepada BBM khusus penugasan, yaitu Peralite. Diberikan sejak 2020, kompensasi diberikan atas selisih kurang harga penetapan Pemerintah dengan harga jual Pertamina. Pada 2023, kompensasi BBM

mencapai Rp126 triliun.

5. Kelima

Kerugian akibat penyimpangan subsidi sebesar Rp 21 triliun. Angka ini kemungkinan diperoleh dari realisasi subsidi BBM tahun 2023 sebesar Rp 20,9 triliun. Subsidi BBM mencakup minyak tanah dan solar. Dalam RDP di DPR (28/3/2022), petinggi Pertamina mengaku solar subsidi bocor ke industri besar seperti tambang dan sawit.

Korupsi di Pertamina ini mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan (*Good corporate governance*). Praktik manipulasi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan memperburuk situasi dan menimbulkan risiko sistemik bagi perekonomian nasional (Khairunnisa, 2025). Korupsi dalam BUMN ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan menurunkan efisiensi operasional. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan akan meningkatkan biaya yang tidak perlu dan mengurangi kualitas pelayanan atau produk yang dihasilkan. Selain itu, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk inovasi dan pengembangan malah terhambat oleh praktik korupsi (Hoesein, 2025). Dampaknya, kinerja

BUMN menjadi terhambat, yang berdampak pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas seperti:

1. Kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya inflasi

Tindak pidana korupsi PT Pertamina tentunya berdampak langsung terhadap kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan komponen penting dalam biaya operasional suatu produk. Kenaikan harga BBM ini tentunya dapat memicu inflasi, jika inflasi tidak dapat dikendalikan tentunya dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berakibat langsung pada lesunya pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik tersebut merupakan Indeks Harga Konsumen Kelompok Transportasi (Januari 2020 – Juni 2022) berdasarkan sumber databoks. Dimana grafik tersebut merupakan salah satu bukti kongkret bahwa ketika harga BBM naik pada bulan Juni 2022, Inflasi Transportasi mencapai 5,45% (YoY). Hal itu menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga pada suatu barang berpengaruh sangat sensitive terhadap inflasi.

2. Beban Fiskal dan Anggaran Negara

Negara mengalami kerugian akibat korupsi di Pertamina dimana beban fiskal pemerintah menjadi bertambah. Dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk subsidi BBM dan sektor lainnya berakhir digunakan untuk menutupi kerugian. Dampak dari kejadian ini memungkinkan pemerintah tidak mampu dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program pembangunan nasional yang lain.



Gambar 1. Indeks Harga Konsumen Kelompok Transportasi (Januari 2020 – Juni 2022)
Sumber: Databoks

3. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat dan Investor

Kasus korupsi Pertamina yang sedang terjadi di dalam negeri saat ini tentunya dapat menurunkan kepercayaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap iklim investasi Indonesia. Masyarakat pun menjadi sulit untuk percaya terhadap pemerintah dan transparansi hukum yang ada. Kasus korupsi yang tinggi dalam suatu negara membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, hal ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Potensi Kerugian *Gross domestic product* (GDP)

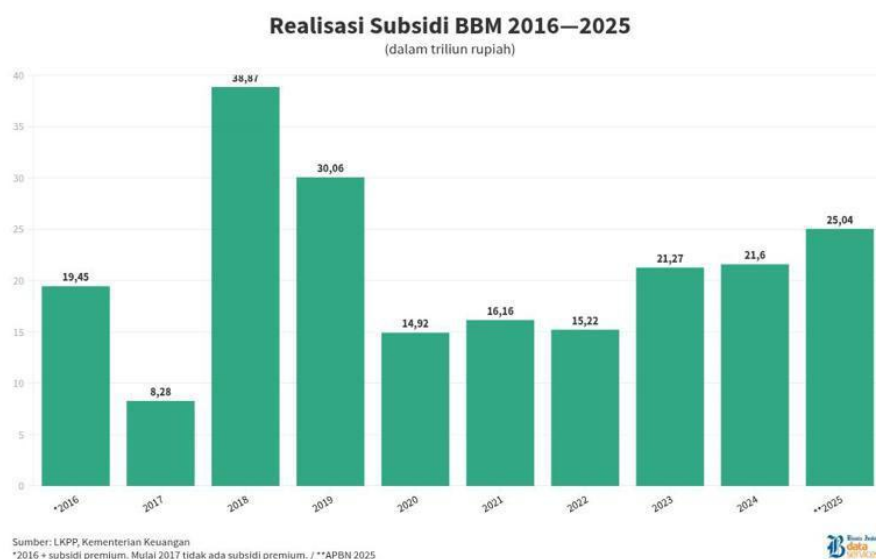
Skandal korupsi di Pertamina berdampak pada hilangnya potensi *Gross domestic product* (GDP) sebesar Rp 13,4 triliun. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk belanja konsumsi lainnya justru tersedot untuk membeli BBM yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan (Kurnia, 2025).

5. Defisit Anggaran

Korupsi tentunya dapat menyebabkan defisit anggaran hal itu terjadi karena keuangan negara yang seharusnya masuk ke kas negara justru dialokasikan untuk subsidi BBM, sehingga hal tersebut memaksa pemerintah untuk berutang atau mengurangi anggaran dari tiap sektor (Awi, 2025).

Realisasi subsidi untuk BBM ditahun 2018 sangat meningkat, hal itu bertepatan dengan awal mulainya korupsi Pertamina. Hal ini menyebabkan terjadinya pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM. Dengan adanya korupsi Pertamina ini jelas bahwa “APBN Tergerus” secara keseluruhan, kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menggerus APBN. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk subsidi, yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur (Christian, 2025).

Akibat dari subsidi yang membengkak, menyebabkan berkurangnya pendapatan negara yang mana akhirnya utang negara meningkat dan terjadinya pemotongan anggaran di tiap tiap sektor atau mengalihkan anggaran sektor lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, menurut kejaksan agung korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk sektor energi , dapat menyebabkan kebocoran anggaran hingga 50% dari total anggaran proyek yang dicadangkan serta masyakat atau konsumen pun tentunya merasa dirugikan, sebab masyarakat harus membayar lebih mahal untuk BBM akibat harga minyak yang tinggi.



Gambar 2 Pengeluaran Negara untuk Subsidi BBM yang Dikorupsi
Sumber: LKPP, Kementerian Keuangan



Gambar 3 Grafik Harga Saham PT Pertamina Geothermal Energy (9 Maret 2025)
 Sumber: Investing.com Indonesia

Pengaruh Korupsi Pertamina terhadap Pergerakan Saham PT Pertamina Geothermal Energy & Nilai Tukar Rupiah

Kasus korupsi Pertamina telah mengikis kepercayaan investor. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan harga saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) tercatat selama seminggu ini di tanggal 09 Maret 2025, penurunan harga sebesar 2,89%. Penurunan harga saham ini tidak dapat diprediksi akan terus berlanjut hingga kapan, penurunan harga saham ini mungkin dapat dikendalikan ketika Pertamina dapat kembali memperbaiki citranya dimata publik. Sebab hal ini tentunya menyebabkan arus keluar modal (*capital outflow*) yang berkontribusi pada pelemahan nilai tukar rupiah (investing.com, 2025). Selain itu nilai tukar rupiah mengalami tekanan, dengan proyeksi hampir mencapai RP 17.000 per dolar AS beberapa pengamat mengatakan bahwa hal ini mendekati hal terburuk sejak krisis 1998. Sebagai respons terhadap tekanan pada nilai tukar, Bank Indonesia mungkin perlu menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Ini termasuk kemungkinan *intervensi* di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah. Namun, tantangan eksternal seperti kebijakan tarif *impor* dari negara lain juga menambah kompleksitas situasi ini. Secara keseluruhan, skandal korupsi di Pertamina tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang lebih luas dalam ekonomi Indonesia, berpotensi memperburuk kondisi nilai tukar rupiah dan stabilitas *investasi*.

Keterkaitan Korupsi Pertamina terhadap Sektor Perbankan

Korupsi di Pertamina menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan dan pengawasan dalam sektor BUMN, dimana ini dapat berdampak langsung terhadap investasi. Dampak dari adanya kasus ini dapat meluas hingga meningkatkan premi risiko, penurunan peringkat kredit, dan dapat menyebabkan aliran modal keluar. Jika kasus ini dibiarkan begitu saja tentunya dapat memicu ketidakpastian sistematis dalam tata kelola BUMN serta berpengaruh terhadap stabilitas lingkungan bisnis secara menyeluruh. Skandal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sektor perbankan, khususnya *Non Performing Loan* (NPL) sebab dampak dari kasus ini mungkin saja perusahaan perusahaan yang menekuni sektor energi tidak bisa membayar tagihannya di bank. Untuk itu bank yang memiliki piutang besar di sektor energi perlu meningkatkan pencadangan kredit, guna menekan profitabilitas serta memperketat likuiditas industri perbankan untuk jangka menengah (Rojani, 2025). Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kasus ini dapat menyebabkan penundaan proyekproyek baru disektor energi, sehingga ada kemungkinan proyek tersebut mankrak. Hal itu dikarenakan investor cenderung menunggu situasi lebih stabil sebelum melanjutkan untuk investasi. Selain itu masyarakat mulai beralih ke SPBU asing yang dianggap lebih terpercaya meskipun dengan harga yang lebih mahal.

Korupsi Pertamina Melemahkan GDP Indonesia

Kasus tindak pidana korupsi di Pertamina ini tentunya cukup berpengaruh sangat signifikan terhadap *Gross domestic product* (GDP). Dimana akibat kasus korupsi tersebut Government (G) atau yang lebih dikenal dengan belanja negara mengalami defisit anggaran, dimana uang yang seharusnya dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangun dan lainnya menjadi terhambat atau tidak terlaksanakan. Selain itu terjadi

defisit APBN, karena pemerintah harus tetap membiayai belanja negara, meskipun ada kebocoran anggaran akibat korupsi. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk melakukan tindak penyidikan dan pengawasan. Kerugian negara akibat korupsi Pertamina ini mencapai Rp 193,7 triliun per tahun atau sekitar 1% dari GDP Indonesia tahun 2023 (GDP Indonesia tahun 2023 sebesar 20.892,4 triliun) dan jika diakumulasikan selama 5 (lima) tahun maka kerugian negara yang ditanggung yaitu setara dengan 5%. Selain itu kasus korupsi Pertamina ini tentunya akan mengurangi kepercayaan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap sektor energi. Investasi investor asing ada kemungkinan untuk menarik modalnya dan memindahkannya ke negara lain yang lebih transparan, penurunan investasi tentunya akan menghambat stabilitas ekonomi, mengingat sektor energi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu penciptaan lapangan kerja dan output ekonomi menjadi lebih rendah, sebab dana investasi tidak masuk ke sektor industri serta infrastruktur melainkan dikorupsi.

Negara yang memiliki kasus korupsi yang besar tentunya akan membuat investor dari luar, enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal itulah yang menyebabkan investor investor tidak tertarik, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut menjadi lesu dan sulit untuk maju. Kemudian dalam hal consumption akibat terjadinya korupsi Pertamina, harga BBM meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun, dimana hal tersebut akan membuat permintaan barang dan jasa pun akan turun, yang dapat menyebabkan pertumbuhan consumption dalam GDP akan melemah. Ketika harga BBM naik tentunya biaya transportasi untuk barang dan jasa akan meningkat, jika hal tersebut terus dibiarkan maka akan menyebabkan inflasi serta semua kenaikan biaya operasionalnya tentunya ditanggung oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM tentunya mengharuskan masyarakat untuk keluar lebih banyak uang untuk BBM sehingga konsumsi mereka terhadap kebutuhan pokok serta barang lainnya menjadi berkurang dan masyarakat juga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan lainnya sebab biaya operasional meningkat hal itu dapat mendorong lebih banyak orang jatuh kedalam angka kemiskinan yang tentunya akan semakin memperburuk daya beli dan konsumsi nasional.

Data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga energi memiliki dampak yang signifikan pada angka kemiskinan di Indonesia yang membuat terjadi ketimpangan sosial. Dampak korupsi Pertamina ini jika tidak segera ditangani dapat membuat pertumbuhan ekonomi jadi melambat, sebab consumption adalah komponen terbesar dalam GDP Indonesia. Kasus korupsi Pertamina ini juga tentunya berpengaruh terhadap *Net Ekspor* dan *Impor* dalam komponen GDP. Dimana Indonesia sebagai *eksportir* minyak mentah akan menurun, ini tentunya akan mengurangi surplus perdagangan atau memperbesar defisit neraca perdagangan. *Impor* BBM akan semakin meningkat, karena kebutuhan BBM dalam negeri tidak dapat tercukupi, ketika *import* lebih tinggi dibandingkan *ekspor* ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu tentunya akan membuat defisit neraca perdagangan menjadi membesar yang dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Keadaan yang saat ini tengah menimpa Pertamina akibat kasus korupsi pengadaan BBM tentunya mengguncang berbagai pihak, diantaranya kepercayaan masyarakat, pemerintah serta investor. Kasus ini tentunya bukan hanya sekedar skandal, tetapi juga menyangkut reputasi bisnis energi dimata nasional serta internasional. Demi mengembalikan citra perusahaan, Pertamina harus melakukan riset terbuka dengan dunia akademik dan lembaga independen untuk memastikan bahwa kualitas BBM yang diproduksi tetap memenuhi SOP yang ada dan tidak membahayakan konsumen. Selain itu Pertamina harus transparan serta jujur dan adil dalam menindak lanjuti pihak pihak yang diduga sebagai tersangka. Pertamina juga harus meminta maaf kepada konsumen atau masyarakat atas kasus yang telah terjadi serta berkomitmen untuk segera memperbaiki tata kelola manajemen dan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kerugian yang telah mereka alami. Untuk mengembalikan kepercayaan public Pertamina harus melakukan pembuktian secara ilmiah bahwa produk yang mereka jual berkualitas, serta meluncurkan program program strategis atau CSR yang mungkin bisa mengembalikan citra perusahaan (Rahman, 2025).

Kesimpulan

Kasus korupsi di Pertamina memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan investor dan pertumbuhan GDP nasional. Akibat kasus korupsi tersebut Government (G) atau yang lebih dikenal dengan

belanja negara mengalami defisit anggaran, dimana uang yang seharusnya dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dan lainnya menjadi terhambat atau tidak terlaksanakan. Kerugian negara akibat korupsi Pertamina ini mencapai Rp193,7 triliun per tahun atau sekitar 1% dari GDP Indonesia tahun 2023 (GDP Indonesia tahun 2023 sebesar Rp20.892,4 triliun). Selain itu, investor asing maupun domestik akan hilang kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka akan menarik dan memindahkan modalnya ke negara lain yang lebih transparan.

Negara yang memiliki kasus korupsi besar tentunya akan membuat investor dari luar enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lesu dan sulit untuk maju. Kemudian, dalam hal Consumption (C) akibat korupsi Pertamina, masyarakat merasa dirugikan karena telah dikelabui sehingga daya beli masyarakat menurun, dimana hal tersebut akan membuat permintaan barang dan jasa menurun, yang dapat menyebabkan pertumbuhan Consumption dalam GDP akan melemah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola perusahaan yang lebih transparan, penguatan regulasi anti-korupsi, serta pengawasan ketat terhadap BUMN untuk memulihkan kepercayaan investor dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kejaksaan menduga Pertamina 'mengoplos' Ron 90 dan 92 dan menjualnya dengan harga 92. Jika itu yang terjadi, selisih harga produk di luar mutu yang dijual Pertamina tidak termasuk kompensasi, karena RON 92 adalah jenis BBM umum. Dia bukan kerugian negara, tetapi kerugian konsumen.

Daftar Pustaka

- Awi, M. (2025, Februari 27). Pengamat Beberkan Dampak Korupsi Pertamina Terhadap Perekonomian dan Kepercayaan Investor. Retrieved from inikata.co.id: <https://inikata.co.id/2025/02/27/pengamat-beberkan-dampak-korupsi-pertaminaterhadap-perekonomian-dan-kepercayaan-publik/>
- Chetwynd, E. C. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. *Management Systems International*, 5 - 16.
- Christian, F. M. (2025, Maret 1). Kasus Korupsi Pertamina dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Nasional. Retrieved from www.kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/fransmaeshachristian2711/67c266a7c925c45e821d4633/ka-sus-korupsi-pertamina-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-nasional>
- Databoks. (2022, Juni). BBM naik pada Bulan Juni 2022, Inflasi Transportasi mencapai 5,45% (YoY). Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/ekonomimakro/statistik/8https://databoks.katadata.co.id/ekonomimakro/statistik/8https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/8>
- Fridana, I. &. (2009). Analisis faktor yang mempengaruhi keputusan investasi (studi pada mahasiswa di Surabaya). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Hoesein, P. &. (2025). Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN. *Jurnal Retentum*, 93-107.
- Investing.com, S. (2025, Maret 9). PT. Pertamina Geothermal Energy (PGEO). Retrieved from id.investing.com: <https://id.investing.com/equities/pt-pertamina-geothermal-energy>
- Kejagung, R. (2025, Februari 25). 7 Tersangka Di Tetapkan dan Tahan Dalam Perkara Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina. Retrieved from kejaksaan.go.id: https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3996/read?utm_
- Khairunnisa, B. (2025, Maret 2). Tersandung Kasus Korupsi BBM? Dampaknya ke Perekonomian Pertamina. Retrieved from disway.id: <https://disway.id/read/858938/tersandung-kasuskorupsi-bbm-apa-dampaknya-ke-perekonomian-pertamina>
- Kiki. (2025, Maret 4). Korupsi Pertamina dan Prinsip Masalah. Retrieved from lpm.uinsyahada.ac.id: <https://lpm.uinsyahada.ac.id/korupsi-pertamina-dan-prinsip-masalah/>
- KPK. (2022, Mei 20). Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. Retrieved from aclc.kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanyadampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>
- Kurnia, E. (2025, Maret 5). Pertamina Pastikan Tak Ada Penyitaan Aset Strategis di Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah. Retrieved from www.kompas.id:

<https://www.kompas.id/artikel/pertamina-pastikan-tak-ada-penyitaan-aset-strategis-perihal-kasus-tata-kelola>

- LKPP, K. (2025). Subsidi BBM 2016 - 2025. Retrieved from djpb.kemenkeu.go.id: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>
- Martiar, N. A. (2025, Februari 25). Kronologi Kasus Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Produk RON 90 Dibayar Seharga RON 92. Retrieved from www.kompas.id: <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-kasus-pertamina-rugikan-negara-rp-1937-triliun-produk-ron-90-dibayar-seharga-ron-92>
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Pasific. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21.
- Rahman, D. (2025, Maret 8). Memperkuat Pertamina dengan Reformasi Tata Kelola yang Transparan. Retrieved from www.dunia-energi.com: <https://www.duniaenergi.com/menguatkan-pertamina-dengan-reformasi-tata-kelola-yang-transparan/>
- Rojani, D.M. (2025, Februari 28). Pengamat: Kasus Korupsi Pertamina Gerus Kepercayaan Investor. Retrieved from kabarbursa.com: <https://kabarbursa.com/makro/122808/pengamat-kasuskorupsi-pertamina-dapat-gerus-kepercayaan-investor>
- Septyanto, D. (2013). Faktor faktor yang mempengaruhi investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di bursa efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*.
- Van den Bergh, J. C. (2009). The GDP paradox. *Journal of economic psychology*, 117-135.

